



Dugaan Korupsi Pengadaan Pupuk Rp 800 Juta ✓

Kejaksaan Segera Periksa Rekanan

“Yang jelas rekanan dari Karangasem, 5 perusahaan yang bertindak pengadaan pupuk, tetapi pemiliknya satu orang. Mestinya melalui tender, tetapi berlangsung penunjukkan”

(Kajari Amlapura)

AMLAPURA, NusaBali

Penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura bergerak cepat dalam penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dalam pengadaan pupuk senilai Rp 800 juta di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem. Penyidik secepatnya akan memanggil rekanan untuk menjalani pemeriksaan dan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Hanya saja, belum bisa diprediksi jumlah calon tersangka yang terjaring terkait kasus itu. Sebab, sejumlah orang dari jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem telah menjalani pemeriksaan, namun statusnya masih sebagai saksi-saksi.

Kepala kejari (Kajari) Amlapura Ivan Jaka didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Aditya Okto Thohari menjelaskan hal ini di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Hanya saja lagi-lagi Kajari Amlapura menolak memberikan keterangan terkait identitas rekanan, alasannya masih dalam penyelidikan.

“Yang jelas rekanan dari Karangasem, lima perusahaan yang bertindak pengadaan pupuk, tetapi pemiliknya satu orang. Mestinya pengadaan pupuk melalui tender, tetapi berlangsung penunjukkan,” jelas Kajari Amlapura.

Disinggung apakah rekanan terkait

keluarga pejabat, dan ada hubungannya dengan anggota DPRD Karangasem masih aktif seperti kabar yang santer beredar belakangan? “Nantilah, tunggu hasil penyelidikan. Pemeriksaan masih diperdalam,” tambahnya.

Kajari Amlapura kembali menjelaskan, dana Rp 800 juta untuk pengadaan pupuk itu sesuai aturan mestinya melalui tender, justru dipecah lima, sehingga pengadaan bisa dilakukan melalui penunjukan.

Anehnya lima perusahaan yang bertindak sebagai pengadaan pupuk, pemiliknya satu orang. “Kenapa dana yang tersedia dipecah, mestinya utuh Rp 800 juta, dan sesuai aturan mesti melalui tender, di situ letak masalahnya,” katanya.

Sehingga lanjut Kajari Amlapura dana untuk pengadaan pupuk, utuh Rp 800 juta, tanpa ada pemotongan. Sebab, jika melalui tender ada penawaran, otomatis ada dana yang berkurang. Hanya rekanan yang menawar paling rendah wajib menang tender.

Hanya saja lanjut Kajari Amlapura, kerugian negara, setelah berlangsung penunjukan pengadaan pupuk, belum terungkap. Sebab, masih menunggu hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan), selaku auditor negara.

Dana tersebut katanya tertuang dalam APBD 2013. Pengadaan pupuk, untuk beberapa kelompok tani. Lagi pula terungkap, dana tersebut terlebih dahulu tertuang dalam APBD, selanjutnya kelompok mengajukan proposal. “Artinya dana terlebih dulu ada, baru dimohonkan melalui proposal. Mestinya pengajuan melalui proposal terlebih dahulu atas dasar usulan itulah ditunjukkan dalam APBD,” tambahnya.

Kasus pengadaan pupuk, katanya, mirip dengan pengadaan bibit di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Karangasem tahun 2013, sehingga berekses hukum, akibatnya menjerat dua jadi tersangka. **k16**

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 8



Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida Pusat Kucurkan Rp 33 Miliar

SEMARAPURA, NusaBali

Bupati I Nyoman Suwirta memastikan pembangunan fisik Rumah Sakit Pratama di Nusa Penida bisa direalisasikan tahun 2015. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Suwirta, Kamis (18/3), menyusul kucuran Dana Tugas Pembantuan (DTP) dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp 33 miliar. "Perencanaan sudah selesai, tinggal membangun saja," ujar Bupati Suwirta.

Sebelumnya, Bupati Suwirta menyatakan pihaknya mengutus tim yang dipimpin Kadiskes Klungkung, dr I Gusti Ngurah Agung Suastika, untuk mengurus bantuan keuangan DTP tersebut.

Dikatakan Suwirta, RS Pratama di Nusa Penida akan dibangun di lahan seluas sekitar satu hektare. Tanah tersebut merupakan tanah milik Pemprov Bali



Bupati I Nyoman Suwirta.

yang sudah diizinkan digunakan untuk lokasi pembangunan RS Pratama tersebut. "Karena itu tahun ini juga, pembangunan sudah bisa dimulai," tegas Bupati Suwirta.

Untuk tahap awal yang siap

dibangun, kata dia, adalah tembok panyengker dan tiga unit gedung. Tembok panyengker dan pembangunan tiga unit gedung dianggarkan Rp 30 miliar. Sedang Rp 3 miliar lagi, untuk pengadaan alat kesehatan (alkes). Rencana pembangunan RS Pratama di Nusa Penida ini terkait kondisi pelayanan kesehatan masyarakat di Nusa Penida yang kurang memadai. Keadaan itu tidak lepas dari keterbatasan sarana pelayanan kesehatan di Nusa Penida. "Itu kan sudah sering dalam kunjungan Pak Gubernur, kan masyarakat menyampaikan hal itu," tambah Kabag Humas dan Protokol I Wayan Parno. Karena itulah lanjut Parno, direncanakan pembangunan RS Pratama, selain peningkatan layanan Puskesmas Nusa Penida I di Sampalan. **k17**

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 6



★ Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Dermaga Gunaksa



SEJUMLAH saksi memberi kesaksiannya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, gratifikasi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (18/3).

• NUSABALI/YUDA

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015
Hal : 5



Sambungan

DENPASAR, NusaBali
Sidang dugaan korupsi Dermaga Gunaksa, gratifikasi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra kembali dilanjutkan pada, Rabu (18/3) dengan memeriksa delapan orang saksi. Namun diawal sidang, anak terdakwa, Luh Putu Widyapsari menyatakan keberatan memberikan kesaksian dan memilih mundur sebagai saksi.

Hal ini sempat membuat perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim Pengadilan Tipikor. Pasalnya, meski sudah menyatakan keberatan, namun JPU tetap memaksakan kesaksian Widyapsari dengan alasan akan memberikan keterangan terkait pencucian uang dan dalil-dalil UU Tipikor. Namun baru saja membacakan UU Tipikor tersebut, majelis hakim lalu memotongnya dan memutuskan Widyapsari bisa menolak untuk bersaksi.

"Silahkan keluar," ujar majelis hakim Hasoloan Sianturi sambil mempersilakan Widyapsari keluar ruang sidang. Sidang sendiri akhirnya dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi lainnya. Saksi pertama yang diperiksa, yaitu IB Susila yang

merupakan salah satu pemilik tanah di lokasi eks galian C di Desa Gunaksa, Klungkung yang akan dijadikan dermaga.

Dalam keterangannya, Susila mengaku sempat membeli 3 bidang tanah di lokasi tersebut dengan luas masing-masing 90 are, 34 are dan

are. "Saya beli sekitar bulan Oktober 2007 dengan harga Rp 8 juta per are," jelasnya. Baru sekitar 3 bulan, tepatnya pada Januari 2011 tanah yang dibelinya tersebut terkena pembebasan lahan untuk Dermaga Gunaksa. Susila mengaku hampir sebagian besar tanahnya

terkena pembebasan dan dibayar Rp 14 juta per are. "Total saya dapat untung Rp 900 juta," ujarnya saat ditanya majelis hakim.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Warsa T Bhuwana sempat menanyakan terkait hubungan Susila dengan ter-

dakwa. "Saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu sebelumnya," ujarnya. Selanjutnya, giliran staf kredit Bank Mandiri, Ni Luh Putu Sulistiawati yang diperiksa terkait dugaan pencucian uang. Dalam keterangannya, Sulistiawati mengaku sempat mengeluarkan kredit angunan deposito untuk PT BSA. Namun ia mengatakan lupa siapa yang mengajukan kredit tersebut.

Termasuk saat ditanya siapa yang akhirnya mencairkan dan melunasi kredit sebesar Rp 2 miliar tersebut. Majelis hakim yang geram dengan keterangan saksi, sempat membacakan UU Tipikor yang mengancam saksi yang tidak memberikan keterangan secara benar diancam hukuman penjara 3 tahun dan maksimal 12 tahun.

"Bagaimana bank anda bisa dipercaya kalau anda tidak mengenali nasabah anda sendiri," ujar majelis hakim. Sementara lima saksi lainnya yang diperiksa, yaitu I Nengah Nata Wisnaya, Ni Nyoman Trinadi, Kadek Dwi Handayani, Dwi Pardyadei dan Desak Made Mahartini yang merupakan karyawan di beberapa perusahaan milik anak terdakwa diperiksa terkait beberapa aliran uang. rez

Edisi : Kamis, 19 Maret 2015

Hal : 5